

KALA BATAS ANTARA



tu lalu. Pulau Sebatik, Ambalat, yang merupakan pulau terluar Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, mempunyai pemandangan laut yang indah.



Pendekatan pertahanan negara dilakukan bagi perbatasan yang jarang didiami penduduk.”

Agus Purnomo
Anggota Komisi II

wilayah perbatasan sebagai beranda negara sehingga harus diperhatikan karena merupakan wajah terdepan di hadapan negara lain.

Okupasi tersebut diwujudkan dengan adanya keberadaan sosok negara yang diwakili oleh instansi dan pejabat pemerintah, baik dari pihak pemerintah daerah, tentara, maupun polisi, serta adanya pemberian pelayanan publik untuk kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan permasalahan di perbatasan tidak bisa ditangani secara parsial.

Kondisi ini mempersulit pengelolaan kawasan perbatasan. “Sekilas saja sudah ada dimensi ekonomi dan pertahanan. Ini tidak mudah ditangani,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (13/8).

Ia menyatakan beberapa konsep pengelolaan kawasan perbatasan sudah pernah dilakukan. Namun, titik koordinasi antarlembaga tidak dapat berfungsi maksimal. Akibatnya konsep tersebut gagal. Ego sektoral masih menguasai seluruh instansi.

Kini pemerintah berupaya melakukan pengelolaan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurutnya, berdirinya BNPP merupakan kemajuan pengelolaan kawasan perbatasan.

Tapi, Agus Kartasasmita memberikan catatan bahwa BNPP harusnya tidak dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Koordinasi BNPP harusnya langsung berada di bawah koordinasi wakil presiden. Koor-

dinasi ini untuk mematahkan ego sektoral tiap-tiap institusi.

Anggota Komisi II dari F-PKS Agus Purnomo mendeteksi bahwa persoalan utama perbatasan adalah keamanan dan kesejahteraan penduduk. BNPP sampai saat ini belum juga menyampaikan desain besar dalam penanganan masalah perbatasan.

“Yang harus diutamakan adalah membangun fasilitas pelayanan dasar yang bisa mengimbangi negara tetangganya. Pelayanan dasar itu adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengurusan izin imigrasi yang lebih mudah. Itu berarti membutuhkan Kemenkes, Kemendiknas, dan Kemenkum dan HAM. Adapun Kemendagri bertanggung jawab soal manajerialnya saja,” jelasnya.

Pendirian fasilitas pelayanan dasar diutamakan bagi daerah perbatasan yang didiami populasi manusia cukup banyak. Sementara pendekatan pertahanan negara dilakukan bagi perbatasan yang jarang didiami penduduk.

Satu hal, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini menyatakan daerah perbatasan merupakan salah satu fokus Kementerian PDT pada tahun ini. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan 10 sektor terkait untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan.

Menurutnya, kalau dilihat dari pendekatan pemerintah daerah, yaitu kabupaten/kota, dari 38 kabupaten/kota itu berada di kawasan perbatasan, sebanyak 27 kabupaten daerah tertinggal. Selain itu, walaupun kelihatannya jumlah pulau terluar mencapai 22 pulau, hanya 1 berpenghuni, 13 pulau itu musiman, dan selebihnya pulau-pulau tidak berpenghuni.

Sehingga, dari 92 pulau, 66 merupakan kepulauan di daerah tertinggal. “Kami melakukan upaya maksimal yaitu koordinasi dengan 10 sektor bahwa masih banyak hal yang dioptimalkan itu memang harapan masyarakat dan harus dijalankan,” katanya. (Din/Tup*/P-3)

maria@mediaindonesia.com

TERDEPAN DI INDONESIA



GRAFIS: FREDY Sumber: Hasil ekspedisi Tim Garis Depan Nusantara, 2010

MINIMNYA alokasi anggaran untuk membangun fasilitas infrastruktur dasar dan mendorong aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar daerah perbatasan tetap tak beranjak menjadi lebih baik. Padahal terdapat paling tidak 16 departemen

teknis yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Dengan program pembangunan yang tidak terstruktur dan terkoordinasi, tidak aneh jika kondisi di wilayah perbatasan sangat memprihatinkan.

Pemerintah mencoba men-

cari solusi terbaik untuk pengawasan pembangunan di area perbatasan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun ditunjuk untuk mengepalai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Apakah lembaga ini akan menjadi jawaban terbaik bagi mereka yang tinggal di

Menengahi Karut-marut Pembangunan di Perbatasan

perbatasan? Berikut petikan wawancara *Media Indonesia* dengan **Mendagri Gamawan Fauzi** tentang BNPP.

Bagaimana sejarah pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan?

Ini adalah salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan BNPP sendiri sudah rampung dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Kami sedang menyelesaikan organisasi BNPP, berapa jumlah personel, jumlah eselon 1, 2, Deputi 1, sampai ke bawah, hingga eselon 4 ke bawah. Kami tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Kalau Kepres sudah keluar, kita akan resmikan segera badan ini.

Beragam masalah di wilayah perbatasan Indonesia bukanlah barang baru. Sejak Orde Baru hingga saat ini, persoalan kawasan perbatasan selalu menjadi duri dalam dinamika pembangunan nasional. Apakah BNPP akan efektif mengatasi persoalan di area perbatasan?

Saya pikir ini akan efektif. Selama ini sudah jalan, tapi program kementerian pada jalan sendiri-sendiri. Misalnya, pendapatan guru di perbatasan, sudah dijalankan Kementerian Pendidikan Nasional.

Penempatan jumlah personel di perbatasan, juga dilakukan Polri dan TNI. Tapi belum ada saling koordinasi antara satu dengan yang lain.

Berapa besar anggaran biaya yang dibutuhkan?

Kalau sampai saat ini masih sekitar Rp25 miliar, karena masih soal pembentukan. Tapi mulai 2011 nanti akan dirumuskan kembali. Tapi intinya, BNPP hanya melakukan tugas sebagai pengelola. Pembangunan di kawasan perbatasan tetap dilakukan kementerian terkait. Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan pembangunan, Departemen Perhubungan akan membangun infrastruktur perhubungan. BNPP tidak akan memakan anggaran mereka. Tapi BNPP mengarahkan program lima

Luasnya wilayah perbatasan Indonesia. Di Kalimantan saja perbatasannya itu sepanjang 3.000 kilometer. Permukiman penduduk juga tersebar. Persebaran penduduk rata-rata di wilayah perbatasan sekitar 51 jiwa per 1 kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di daerah perbatasan relatif kecil, atau kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Dan, secara lebih

jauh, kondisi masyarakatnya adalah masyarakat miskin. Sarana transportasi yang minim juga jadi masalah. Masyarakat di perbatasan yang cuma 200 kepala keluarga (KK), misalnya, kalau dibuat jalan akan menjadi mahal. Maka dari itu, harus diidentifikasi ada berapa KK saudara kita di sana? Belum lagi masalah status lahan. Jangan-jangan banyak material dan hasil bumi kita yang dijual ke daerah tetangga. Pengamanan seperti ini yang sangat berat. (* / B-1)



Apakah BNPP akan efektif mengatasi persoalan di area perbatasan?

Gamawan Fauzi
Mendagri